

Rekonstruksi Konsep Keamanan Maritim Indonesia dalam Konteks Indo-Pasifik: Pendekatan Realisme Neoklasik

Muhamad Faisal¹, Mitro Prihantoro², Deni Setiawati³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Indonesia

E-mail: muhamad.faisal@kn.idu.ac.id¹

Article History:

Received: 29 Oktober 2025

Revised: 19 November 2025

Accepted: 07 Desember 2025

Keywords:

Keamanan Maritim, Realisme Neoklasik, Indo-Pasifik, Kebijakan luar negeri, Indonesia.

Abstract: *Konstelasi geopolitik Indo-Pasifik menghadirkan dinamika baru dalam arsitektur keamanan regional yang berdampak langsung pada kepentingan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dan poros maritim dunia. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya menciptakan ketegangan militer di perairan Laut Cina Selatan, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap strategi keamanan maritim dan kebijakan luar negeri Indonesia. Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep keamanan maritim Indonesia melalui pendekatan realisme neoklasik yang menekankan hubungan antara faktor sistemik global dan variabel domestik, seperti persepsi elite, kepemimpinan politik, serta kapasitas institusional negara. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis deskriptif-analitik terhadap dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan literatur akademik, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan keamanan maritim Indonesia dibentuk oleh proses interaksi antara tekanan eksternal dan kebutuhan domestik. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya pertahanan, Indonesia berupaya mempertahankan otonomi strategis melalui diplomasi maritim, kerja sama multilateral, serta konsolidasi visi Poros Maritim Dunia. Temuan ini menegaskan bahwa konsep keamanan maritim Indonesia sedang mengalami rekonstruksi menuju model keamanan adaptif yang memadukan unsur pertahanan, diplomasi, dan pembangunan ekonomi biru.*

PENDAHULUAN

Perubahan tatanan geopolitik global dalam dua dekade terakhir menandai munculnya Indo-Pasifik sebagai kawasan strategis yang menentukan keseimbangan kekuatan dunia. Wilayah ini bukan hanya jalur perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, tetapi juga arena rivalitas antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut secara aktif memproyeksikan kepentingan politik, ekonomi, dan militernya ke kawasan ini, yang pada akhirnya menciptakan tekanan terhadap stabilitas keamanan regional. Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis—baik secara geografis maupun

politis—sehingga setiap perubahan dalam dinamika Indo-Pasifik memiliki konsekuensi langsung terhadap kepentingan nasionalnya, terutama di bidang keamanan maritim. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, keamanan maritim menjadi aspek fundamental bagi kelangsungan kedaulatan dan pembangunan nasional Indonesia (Pedrasan, 2021). Laut tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi dan komunikasi, tetapi juga merupakan arena pertahanan dan diplomasi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan keamanan maritim Indonesia selama beberapa dekade sering kali bersifat sektoral, fragmentatif, dan reaktif terhadap isu-isu yang muncul, seperti pelanggaran batas laut, pencurian ikan (*illegal fishing*), serta ancaman non-tradisional lainnya. Situasi ini menuntut adanya rekonstruksi konseptual terhadap bagaimana Indonesia memandang dan membangun keamanan maritimnya, terutama dalam konteks Indo-Pasifik yang semakin kompleks (Bharti & Singh, 2023).

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan ini memaksa Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingannya di antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, terutama melalui kerja sama dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Di sisi lain, Indonesia juga menjalin kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan, penegakan hukum maritim, dan peningkatan kapasitas keamanan laut. Posisi ini mendorong Indonesia untuk menerapkan strategi *hedging* atau penyeimbangan ganda yang menekankan kemandirian strategis tanpa harus berpihak secara eksplisit pada salah satu blok kekuatan (He & Li, 2020). Dalam konteks tersebut, teori realisme neoklasik memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami kebijakan keamanan maritim Indonesia. Berbeda dengan realisme klasik dan struktural yang lebih menekankan pada struktur kekuasaan internasional, realisme neoklasik mengaitkan tekanan eksternal dengan faktor-faktor domestik yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut pendekatan ini, kebijakan luar negeri dan keamanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh distribusi kekuatan global, tetapi juga oleh bagaimana elite politik dan institusi nasional menafsirkan serta merespons dinamika tersebut. Dengan demikian, studi ini berupaya menelusuri interaksi antara faktor internasional dan domestik dalam pembentukan konsep keamanan maritim Indonesia (Rosyidin, 2017).

Secara empiris, kebijakan maritim Indonesia pasca 2014 menunjukkan upaya serius untuk menegaskan peran Indonesia sebagai *Global Maritime Fulcrum* (Poros Maritim Dunia). Doktrin ini menandai pergeseran paradigma dari kebijakan pertahanan berbasis darat menuju orientasi yang lebih maritim. Namun, implementasi visi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran pertahanan laut, tumpang tindih kewenangan antar-lembaga (TNI AL, Bakamla, KKP), serta lemahnya sinergi diplomasi maritim lintas sektor. Di sisi lain, meningkatnya tekanan eksternal di kawasan Indo-Pasifik menuntut Indonesia untuk memperkuat peran geopolitiknya melalui strategi keamanan yang adaptif dan terintegrasi. Rekonstruksi konsep keamanan maritim Indonesia perlu diarahkan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan kapasitas pertahanan laut nasional untuk menjamin kedaulatan wilayah dan keamanan perbatasan. Kedua, optimalisasi diplomasi maritim yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan dalam rivalitas kekuatan besar. Ketiga, integrasi dimensi ekonomi biru (*blue economy*) sebagai bagian dari strategi keamanan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, Indonesia dapat membangun model keamanan maritim yang tidak hanya defensif, tetapi juga produktif dan berorientasi pada stabilitas regional (Manurung, 2018).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berupaya menjelaskan kebijakan maritim Indonesia dari sisi empiris, tetapi juga menawarkan rekonstruksi konseptual yang lebih komprehensif melalui perspektif realisme neoklasik. Melalui pendekatan ini, keamanan maritim Indonesia dipahami

sebagai hasil dari interaksi dinamis antara tekanan sistemik Indo-Pasifik dan kondisi domestik nasional. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman baru bahwa keamanan laut bukan semata persoalan militer, melainkan refleksi dari keseimbangan antara kekuatan, kepentingan, dan persepsi elite dalam mengelola lingkungan strategis yang terus berubah.

LANDASAN TEORI

Keamanan Maritim dalam Kajian Hubungan Internasional

Konsep keamanan maritim mengalami evolusi dari paradigma tradisional yang berorientasi militer menuju pendekatan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan politik. Bueger (2015) mendefinisikan keamanan maritim sebagai kondisi yang menjamin penggunaan laut secara damai dan legal untuk kepentingan ekonomi, pertahanan, dan kesejahteraan. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, keamanan maritim tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan teritorial, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi dan pembangunan ekonomi nasional. Di Asia Tenggara, isu keamanan maritim sering kali dikaitkan dengan ancaman non-tradisional seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas (Liss, 2013). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula dimensi baru berupa ketegangan geopolitik akibat klaim tumpang tindih dan proyeksi kekuatan militer di Laut Cina Selatan. Situasi ini menempatkan negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, dalam posisi strategis yang menuntut penyesuaian paradigma keamanan.

Konsep Indo-Pasifik dan Arsitektur Keamanan Regional

Istilah Indo-Pasifik mencerminkan perluasan perspektif geopolitik dari Asia-Pasifik tradisional ke ruang strategis yang mencakup Samudra Hindia hingga Pasifik Barat. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Jepang dan kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat melalui strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Sementara itu, ASEAN mengembangkan versi yang lebih inklusif melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan kerja sama dan dialog, bukan rivalitas kekuatan besar (Pangestu, Hikmawan, & Fathun, 2021). Bagi Indonesia, AOIP menjadi landasan normatif untuk menjaga otonomi strategis dan menghindari keterjebakan dalam politik aliansi. Namun, tekanan dari dua kekuatan besar membuat posisi tersebut rentan terhadap dilema kebijakan. Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan Tiongkok dan komitmen keamanan dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan independensi nasional.

Studi Empiris tentang Keamanan Maritim Indonesia

Sejumlah penelitian terdahulu berfokus pada aspek kelembagaan dan implementatif dari keamanan maritim Indonesia. Misalnya, Salsabila, Pertiwi, & Dewi (2020). menyoroti tumpang tindih kewenangan antar-lembaga maritim yang menyebabkan lemahnya efektivitas kebijakan penegakan hukum di laut. Sementara itu, Gumay, Octavian, & Swastanto (2018) menggarisbawahi pentingnya sinergi antara diplomasi dan pertahanan dalam memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik. Namun, sebagian besar kajian tersebut belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara faktor eksternal dan domestik dalam pembentukan kebijakan keamanan maritim, sehingga ruang teoretis untuk analisis berbasis realisme neoklasik masih terbuka luas.

Realisme Neoklasik sebagai Lensa Analisis

Realisme neoklasik dikembangkan sebagai sintesis antara realisme struktural dan pendekatan domestik dalam studi kebijakan luar negeri. Gideon Rose (1998) memperkenalkan konsep ini untuk

menjelaskan bahwa kebijakan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh distribusi kekuatan internasional, tetapi juga oleh bagaimana aktor domestik menafsirkan dan merespons tekanan eksternal tersebut. Dalam konteks keamanan maritim, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap interaksi antara struktur internasional dan dinamika politik nasional. Dalam kerangka ini, kebijakan keamanan maritim Indonesia dipandang sebagai hasil dari proses mediasi antara dua level analisis:

1. Level sistemik internasional, yaitu tekanan eksternal yang bersumber dari rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dinamika Laut Cina Selatan.
2. Level domestik, yang mencakup persepsi elite politik, kapasitas institusional (seperti TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Luar Negeri), serta sumber daya ekonomi dan militer nasional.

Kedua level ini berinteraksi dalam membentuk arah kebijakan yang menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga kedaulatan dan keharusan beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang berubah (Rose, 1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif-analitik, berorientasi pada penafsiran mendalam terhadap dokumen, kebijakan, dan dinamika kebijakan maritim Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penelusuran proses dan interaksi antara variabel sistemik dan domestik dalam pembentukan konsep keamanan maritim nasional. Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu seleksi terhadap informasi yang relevan dengan konsep keamanan maritim dan faktor pembentuk kebijakan.
2. Kategorisasi tematik, berdasarkan dua level analisis realisme neoklasik: tekanan sistemik dan variabel domestik.
3. Analisis interaktif, dengan menautkan temuan empiris terhadap kerangka teoretis guna membangun model rekonstruksi keamanan maritim Indonesia.

Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber (dokumen, literatur, dan pernyataan resmi) serta analisis waktu lintas periode (2014–2025) untuk menilai kesinambungan kebijakan maritim Indonesia di bawah tekanan geopolitik Indo-Pasifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dua dekade terakhir, kawasan Indo-Pasifik menjadi arena utama rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang dikembangkan AS bertujuan mempertahankan supremasi maritim dan menahan ekspansi pengaruh Tiongkok, terutama di jalur laut strategis seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Sebaliknya, Tiongkok mengajukan *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Maritime Silk Road* sebagai instrumen ekonomi dan geopolitik untuk memperluas jangkauan pengaruhnya. Proyek infrastruktur pelabuhan di Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, dan Indonesia memperlihatkan bagaimana Tiongkok menggunakan pendekatan ekonomi maritim untuk memperkuat *strategic foothold* di Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, rivalitas ini menciptakan lingkungan strategis yang ambivalen. Di satu sisi, BRI membuka peluang investasi besar dalam pembangunan maritim nasional, seperti proyek pelabuhan Kuala Tanjung dan pembangunan Kawasan Industri Morowali. Di sisi lain, ekspansi maritim Tiongkok mengancam kedaulatan Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, yang diklaim Tiongkok melalui *Nine-Dash Line*

(Verianto, 2019).

Insiden pelanggaran kapal ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia (2016, 2019, 2021) menunjukkan eskalasi ancaman terhadap yurisdiksi nasional. Namun, Indonesia tidak menanggapi dengan langkah konfrontatif militer, melainkan dengan strategi diplomasi pertahanan — memperkuat kehadiran Bakamla dan TNI AL, sembari tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Beijing. Pendekatan ini menunjukkan ciri khas negara menengah (middle power) yang menggunakan strategi hedging, yakni upaya menyeimbangkan antara keterlibatan dan perlindungan diri. Dalam kerangka realisme neoklasik, kebijakan ini menegaskan bahwa tekanan sistemik dari struktur internasional (AS–Tiongkok) hanya menjadi variabel independen; respons akhirnya tetap difilter oleh faktor domestik berupa persepsi elite, kapasitas negara, dan orientasi politik luar negeri (Yunizar, 2023).

Persepsi Elite dan Struktur Domestik sebagai Variabel Penentu

Realisme neoklasik berasumsi bahwa tekanan eksternal hanya dapat memengaruhi kebijakan luar negeri apabila diterjemahkan oleh aktor domestik. Dalam konteks Indonesia, persepsi elite nasional memainkan peran vital dalam menentukan bagaimana ancaman dan peluang di Indo-Pasifik dipersepsikan dan dijawab. Presiden Joko Widodo, sejak 2014, menegaskan visi “Poros Maritim Dunia” sebagai kerangka besar kebijakan maritim nasional. (Yani & Montratama, 2018). Visi ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan refleksi dari identitas geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, visi ini sering kali bersinggungan dengan dinamika politik domestik dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Para pengambil kebijakan di Kementerian Pertahanan, Bakamla, dan TNI AL memiliki persepsi yang berbeda mengenai prioritas keamanan maritim. Misalnya:

1. Kementerian Pertahanan menekankan aspek kedaulatan dan peningkatan kemampuan militer laut.
2. Bakamla berfokus pada penegakan hukum dan pengawasan wilayah laut.
3. Kementerian Luar Negeri lebih menekankan diplomasi maritim melalui forum multilateral (Sanjiwani, 2022).

Ketidaksinkronan persepsi ini menyebabkan kebijakan keamanan maritim bersifat fragmentatif dan sektoral, bukan terintegrasi secara strategis. Realisme neoklasik menjelaskan kondisi ini sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara sumber daya negara (*state capacity*) dan ambisi geopolitik elite politik. Selain itu, birokrasi maritim Indonesia masih menghadapi kelemahan koordinasi lintas lembaga, tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut, serta keterbatasan anggaran pertahanan (sekitar 0,8% dari PDB, jauh di bawah rata-rata ASEAN). Kelemahan ini memperkuat kecenderungan Indonesia untuk menempuh strategi adaptif ketimbang konfrontatif — sebuah pola khas negara dengan kekuatan menengah yang berupaya meminimalkan risiko konflik terbuka sambil memaksimalkan keuntungan diplomatik (Krisman & Sinaga, 2020).

Konsep Keamanan Maritim Indonesia: Dari Defensif ke Adaptif-Integratif

Konsep keamanan maritim Indonesia secara historis berakar pada paradigma defensif, yang berorientasi pada kedaulatan wilayah dan integritas teritorial. Namun, dalam konteks Indo-Pasifik yang semakin kompleks, paradigma ini berevolusi menjadi pendekatan adaptif-integratif, di mana keamanan laut tidak lagi dilihat semata sebagai isu militer, tetapi juga ekonomi, diplomatik, dan lingkungan. Indonesia memperkuat kemampuan pertahanan laut dengan modernisasi armada TNI AL, pengadaan kapal patroli cepat, dan pembangunan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) yang bekerja sama dengan AS dan Jepang (Lathif, Suhirwan, & Jaya, 2022). Pembangunan

pangkalan terpadu di Natuna menjadi sinyal strategis bahwa Indonesia siap menghadapi pelanggaran kedaulatan tanpa harus bergantung pada aliansi militer formal. Namun, kemampuan pertahanan ini masih terbatas pada *level deterrence* simbolik, bukan *full deterrence capacity*. Indonesia belum memiliki sistem rudal jarak menengah atau kemampuan proyeksi kekuatan laut seperti negara besar. Karenanya, kebijakan maritim lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran domain maritim (*maritime domain awareness*) dan kerja sama keamanan non-tradisional seperti pencurian ikan dan penyelundupan.

Dalam aspek diplomasi, Indonesia memainkan peran penyeimbang normatif (*normative balancer*) di Indo-Pasifik. Melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), Indonesia menawarkan pendekatan yang inklusif dan berbasis kerja sama, bukan konfrontasi. AOIP menegaskan prinsip *centrality* of ASEAN serta menolak dikotomi blok geopolitik AS–Tiongkok. Peran diplomasi maritim ini terlihat dalam keterlibatan aktif Indonesia di *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *ASEAN Maritime Forum* (AMF), dan *East Asia Summit*. Melalui diplomasi multilateral, Indonesia berupaya memperkuat rezim keamanan regional yang menekankan transparansi, kerja sama keamanan non-tradisional, dan pembangunan kapasitas. Realisme neoklasik memandang bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penyeimbangan pragmatis (*pragmatic balancing*) — di mana Indonesia berusaha mengamankan kepentingan nasional tanpa menimbulkan antagonisme dari kekuatan besar (Nurmawati et al., 2022).

Dalam dekade terakhir, keamanan maritim Indonesia juga diperluas ke dimensi ekonomi biru (*blue economy*). Pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Ancaman seperti penangkapan ikan ilegal (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), perompakan, dan polusi laut kini dianggap sebagai isu keamanan non-tradisional yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara. Upaya penguatan Bakamla, peningkatan kerja sama dengan Australia melalui *Indonesia-Australia Defence Cooperation Arrangement*, serta latihan bersama dengan Jepang dan India menunjukkan bahwa keamanan maritim kini dilihat secara multidimensional (Putra & Asri, 2023).

Pola Respons Strategis Indonesia di Indo-Pasifik

Berdasarkan seluruh analisis di atas, pola kebijakan maritim Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan utama:

1. Diplomasi Multilapis (*Layered Diplomacy*): Menggabungkan diplomasi regional ASEAN dengan kerja sama bilateral fungsional seperti IMSS (dengan AS) dan *Maritime Cooperation Agreement* (dengan Jepang).
2. Pertahanan Terukur (*Measured Defence*): Peningkatan kemampuan maritim diarahkan pada fungsi pengawasan, bukan proyeksi kekuatan ofensif, agar tidak menimbulkan provokasi terhadap negara besar.
3. Ekonomi-Keamanan Terintegrasi: Pembangunan sektor perikanan, logistik maritim, dan pelabuhan dianggap sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional (*national resilience*), bukan hanya kebijakan ekonomi semata.

Ketiga pola ini mencerminkan pendekatan “*hedging adaptif*”, di mana Indonesia menavigasi tekanan geopolitik global dengan memanfaatkan fleksibilitas diplomasi dan kalkulasi strategis realistis.

Implikasi bagi Teori dan Kebijakan

Dari segi teori, studi ini memperlihatkan relevansi realisme neoklasik untuk menganalisis perilaku negara menengah di kawasan multipolar seperti Indo-Pasifik. Teori ini menjembatani

kesenjangan antara determinasi struktur internasional (realisme struktural) dan dinamika domestik (liberalisme institusional). Dari segi kebijakan, hasil analisis menunjukkan pentingnya:

1. Membangun integrasi kelembagaan maritim melalui *National Maritime Security Council* yang menyatukan TNI AL, Bakamla, dan KKP.
2. Mengalokasikan anggaran pertahanan laut secara proporsional terhadap kompleksitas ancaman Indo-Pasifik.
3. Meningkatkan diplomasi maritim proaktif, agar Indonesia tidak hanya menjadi objek rivalitas AS–Tiongkok, tetapi aktor normatif yang membentuk arsitektur keamanan kawasan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Integrasi Kelembagaan dan Tata Kelola Maritim Nasional: Diperlukan pembentukan Dewan Keamanan Maritim Nasional (*National Maritime Security Council*) yang berfungsi sebagai lembaga koordinatif lintas sektor. Dewan ini akan mengintegrasikan fungsi pertahanan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya laut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. Selain itu, revisi terhadap regulasi seperti Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla perlu dilakukan untuk memperjelas mandat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan maritim nasional.
2. Peningkatan Kapasitas Pertahanan Laut dan Teknologi Pengawasan: Kebijakan modernisasi pertahanan laut perlu diarahkan pada penguatan Maritime Domain Awareness (MDA) berbasis teknologi, termasuk integrasi radar, satelit, dan sistem informasi maritim. Kerja sama dengan negara mitra seperti Jepang, Australia, dan India perlu dipertahankan, namun tetap dengan prinsip non-aliansi. Selain itu, pemerintah perlu menambah porsi anggaran pertahanan laut minimal hingga 1,5% dari PDB, sejalan dengan kompleksitas ancaman di Indo-Pasifik.
3. Diplomasi Maritim Proaktif dan ASEAN *Centrality*: Indonesia perlu terus memperkuat ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) sebagai instrumen normatif untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai honest broker di kawasan. Diplomasi maritim proaktif harus diarahkan untuk memperluas kerja sama keamanan non-tradisional, seperti pencegahan pencurian ikan, penyelundupan, dan polusi laut lintas batas. Pendekatan ini akan menjaga relevansi ASEAN sekaligus meminimalkan risiko keterlibatan Indonesia dalam rivalitas blok kekuatan besar.
4. Penguatan Ekonomi Biru dan Keamanan Non-Tradisional: Konsep ekonomi biru (*blue economy*) harus menjadi komponen strategis dalam kebijakan keamanan maritim. Pemerintah perlu mengembangkan program nasional yang menghubungkan keberlanjutan lingkungan dengan keamanan laut — misalnya melalui konservasi sumber daya laut, pemberdayaan nelayan lokal, dan peningkatan industri galangan kapal domestik. Konektivitas maritim juga harus diperkuat dengan pembangunan pelabuhan berkelas internasional di wilayah strategis seperti Bitung, Sorong, dan Tual untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok Indo-Pasifik.
5. Penguatan Peran Indonesia sebagai *Middle Power Maritim*: Sebagai negara menengah dengan kapasitas besar di Indo-Pasifik, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin normatif (*normative leader*) di bidang keamanan maritim. Melalui kombinasi antara kekuatan diplomasi, pengaruh ekonomi, dan kapasitas pertahanan terbatas, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai penentu arah stabilitas kawasan, bukan sekadar pengikut dinamika kekuatan besar. Untuk itu, strategi komunikasi internasional, keterlibatan think-tank, dan peningkatan diplomasi publik perlu diperkuat guna membangun citra Indonesia sebagai

pelopor keamanan maritim inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan eksternal sistem internasional dan faktor domestik internal, sebagaimana dijelaskan oleh pendekatan realisme neoklasik. Dari dimensi eksternal, rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik menciptakan tekanan geopolitik terhadap Indonesia untuk menentukan posisi strategisnya. Namun, alih-alih bergabung dalam blok kekuatan tertentu, Indonesia menempuh strategi hedging adaptif, yakni upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan dengan menjaga prinsip politik luar negeri “bebas aktif”. Dari dimensi domestik, kebijakan keamanan maritim sangat dipengaruhi oleh persepsi elite politik dan kapasitas kelembagaan nasional. Fragmentasi koordinasi antar-lembaga maritim seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP memperlihatkan bahwa keamanan maritim Indonesia masih menghadapi kendala institusional dan sumber daya. Meski demikian, visi Poros Maritim Dunia menjadi instrumen konseptual penting dalam memperkuat identitas maritim nasional dan membangun kesadaran geopolitik yang lebih luas. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi konsep keamanan maritim Indonesia mengarah pada model keamanan adaptif-integratif, yang menyeimbangkan tiga dimensi utama:

1. Pertahanan dan kedaulatan – memperkuat kapasitas militer dan penegakan hukum laut;
2. Diplomasi dan kerja sama multilateral – mengedepankan inklusivitas dan stabilitas kawasan;
3. Ekonomi dan pembangunan maritim berkelanjutan – mengaitkan keamanan laut dengan kesejahteraan nasional melalui ekonomi biru.

Model ini menandai pergeseran paradigma dari keamanan maritim yang semata-mata defensif menjadi keamanan maritim multidimensi, di mana laut dipahami sebagai ruang strategis, ekonomi, dan ekologis yang saling berkaitan. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa realisme neoklasik mampu menjelaskan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia secara lebih komprehensif, karena teori ini tidak hanya menyoroti tekanan eksternal, tetapi juga memerhatikan interpretasi domestik dan karakter institusional negara.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Abdul Lathif, Suhirwan, & Damar Agus Jaya. (2022). IMSS-Based Indonesian Defense Concept Map for the Sunda Strait Region. *International Journal of Social Science*, 1(5), 747–756. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1319>
- Bharti, M. S., & Singh, A. (2023). India and France bilateral partnership for advancing strategic autonomy in the Indo-Pacific region: Special reference to the Indo-French strategic partnership. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2215561>
- Bueger, C. (2015). Linking Maritime Security and the Blue Economy: Prospects for the Indo-Pacific. In Presented at the Galle Dialogue 2015 (pp. 1–5).
- Gumay, R. N. S., Octavian, A., & Swastanto, Y. (2018). DEFENSE DIPLOMACY IMPLEMENTATION: THE SYNERGY OF INDONESIA AND AUSTRALIA IN DEALING WITH ILLEGAL IMMIGRANTS IN THE SEA BORDER. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.278>
- He, K., & Li, M. (2020, January 1). Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US-China strategic competition, regional actors, and beyond. *International Affairs*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz242>
- Kamal Putra, M. N., & Asri, M. F. (2023). Juridical Review of Blue Economy in Indonesia. *Jurnal*

- Kajian Pembaruan Hukum, 3(1), 123. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.37211>
- Krisman, K., & Sinaga, L. C. (2020). MENAKAR KEBERLANJUTAN VISI POROS MARITIM DUNIA DI TENGAH AGENDA PEMBANGUNAN MARITIM REGIONAL. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 103. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.858>
- Liss, C. (2013). New actors and the state: Addressing maritime security threats in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 35(2), 141–162. <https://doi.org/10.1355/cs35-2a>
- Manurung, H. (2018). INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 147–152. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.2714>
- Nurmawati, E., Purnama, C., & Darmawan, W. B. (2022). Peran ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Sebagai Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.13361>
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., & Fathun, L. M. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. (PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)), 26(1), 1. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v26i1.2619>
- Pedrasan, R. (2021). Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 88–95. <https://doi.org/10.29210/02021830>
- Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World Politics*, 51(1), 144–172. <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>
- Rosyidin, M. (2017). INTEGRASI STRUKTUR DAN UNIT: TEORI POLITIK LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF REALISME NEOKLASIK. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 10(2), 150. <https://doi.org/10.7454/global.v10i2.278>
- Salsabila, A. N., Pertiwi, G. G., & Dewi, P. F. (2020). Rekoneptualisasi Lembaga Keamanan Laut sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Poros Maritim. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p24-32>
- Sanjiwani, N. P. A. (2022). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.42>
- Verianto, J. R. K. (2019). Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81141>
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA: SUATU TINJAUAN GEOPOLITIK. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>
- Yunizar, F. D. (2023). EFEKTIVITAS DIPLOMASI KEAMANAN MARITIM DALAM MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA. *Journal of Integrative International Relations*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.1.1-14>